



Evaluasi Kinerja Keuangan APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai

Agustina Kala¹, Kristian H.P Lambe², Naomi Patiung³

^{1,2,3} Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 05-07-2025 | Review 12-07-2025 | Revision 20-07-2025 | Accepted 27-07-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus evaluasi diarahkan pada tiga indikator utama: rasio kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal masih sangat rendah karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat seperti DAU dan Dana Otsus. Meskipun efektivitas kegiatan cenderung tercapai, pencapaian target PAD bersifat fluktuatif. Efisiensi pengeluaran juga belum optimal, terutama pada belanja operasional. Selain itu, hasil evaluasi kinerja keuangan belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam proses perencanaan anggaran berikutnya karena lemahnya implementasi rekomendasi audit. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur kinerja keuangan sektor publik, serta menyarankan penguatan sistem pengawasan internal yang berbasis data dan digitalisasi evaluasi kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan APBD di daerah tertinggal.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, kemandirian fiskal, efektivitas anggaran, efisiensi anggaran, Sekretariat DPRD

Abstract

This study aims to evaluate the financial performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) in Paniai Regency using a descriptive qualitative approach. The evaluation focuses on three key indicators: fiscal independence ratio, effectiveness of locally generated revenue (PAD), and efficiency of budget utilization. The findings reveal that the level of fiscal independence remains critically low due to heavy reliance on central government transfers such as the General Allocation Fund (DAU) and Special Autonomy Fund (Otsus). Although most organizational activities were implemented as planned, PAD realization remained inconsistent, and operational spending was not managed optimally. Furthermore, performance evaluation results have yet to be systematically integrated into the budget planning process due to weak implementation of audit recommendations. The study contributes theoretically by enriching the public sector financial performance literature, particularly within legislative support institutions. It also offers practical implications by recommending strengthened internal oversight systems and the adoption of digital-based evaluation tools to improve the accountability and efficiency of public financial management in underdeveloped regions.

Keywords: regional financial performance, fiscal independence, budget effectiveness, budget efficiency, DPRD Secretariat

¹E-mail: agustina_kala@gmail.com

²E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

³E-mail: naomi@ukipaulus.ac.id

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat krusial guna menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik telah tercapai (Mahmudi, 2016).

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertugas mendukung fungsi legislatif memiliki peranan strategis dalam proses penyusunan, pengawasan, serta pelaporan APBD (Bastian, 2010). Namun demikian, permasalahan klasik seperti rendahnya rasio kemandirian fiskal, pemborosan belanja operasional, dan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran masih menjadi tantangan utama di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Paniai (Siregar & Prabowo, 2020; Wahyudi & Prasetyo, 2019).

Data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) masih sangat tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong rendah. Selain itu, efektivitas pencapaian target pendapatan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dinilai masih perlu ditingkatkan. Berikut ini disajikan data ringkasan rasio kinerja keuangan berdasarkan hasil evaluasi:

Tabel 1. Ringkasan Rasio Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai (2021–2023)

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Efektivitas PAD (%)	Efisiensi Anggaran (%)
2021	9,8	72,3	89,5
2022	11,2	76,1	91,8
2023	10,6	70,5	87,4

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan LAKIP Sekretariat DPRD Paniai, diolah (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal belum mengalami peningkatan signifikan. Efektivitas PAD cenderung fluktuatif, sedangkan efisiensi penggunaan anggaran masih belum mencapai tingkat ideal. Hal ini menandakan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD agar tata kelola keuangan dapat semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencapaian hasil.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan-temuan kualitatif dalam penelitian lapangan, di mana sebagian besar informan dari kalangan eksekutif dan legislatif mengakui masih terdapat inefisiensi dalam belanja rutin serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi internal. Dengan demikian, diperlukan studi mendalam yang tidak hanya memotret kondisi keuangan secara kuantitatif melalui rasio-rasio, tetapi

juga menelaah konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang melatarbelakangi kondisi tersebut.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini menjadi penting karena bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai, yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran. Evaluasi yang komprehensif diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta memperkuat prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

Tinjauan Literatur

Kinerja Keuangan Daerah: Teori dan Perspektif

Kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan publik secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, pemerintah sebagai entitas yang menggunakan dana masyarakat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut melalui pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2018).

Menurut Mahmudi (2016), kinerja keuangan daerah dapat dinilai melalui tiga indikator utama, yaitu rasio kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan, dan efisiensi pengeluaran. Evaluasi terhadap ketiga indikator ini menjadi dasar untuk menilai kualitas pengelolaan APBD di tingkat daerah. Sementara itu, Robbins dan Coulter (2018) menyatakan bahwa efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan organisasi tercapai, dan efisiensi menunjukkan perbandingan optimal antara input dan output.

Dalam konteks otonomi daerah, evaluasi kinerja keuangan menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Harun, 2020).

Definisi Operasional Konsep Kunci

Rasio Kemandirian Keuangan: Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer pusat (Suwandi, 2019).

Efektivitas Pengelolaan PAD: Perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi rasio ini, semakin efektif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatannya (Mahmudi, 2016).

Efisiensi Penggunaan Anggaran: Menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan anggaran secara hemat dan optimal. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan (Bastian, 2021).

Penelitian Terdahulu

Berbagai studi telah mengkaji evaluasi kinerja keuangan daerah dengan pendekatan rasio keuangan. Siregar dan Prabowo (2020) dalam penelitiannya di beberapa pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian fiskal, semakin besar kemampuan daerah dalam mengatur kebijakan fiskal

secara otonom dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Lestari (2019) menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang realistis serta kontrol penggunaan anggaran yang ketat.

Dalam konteks daerah tertinggal, Ardiansyah (2021) menunjukkan bahwa efektivitas realisasi PAD seringkali terhambat oleh rendahnya kapasitas administrasi dan kurangnya database wajib pajak yang memadai. Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Paniai yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat.

Studi oleh Wahyudi dan Prasetyo (2019) menyoroti bahwa efisiensi pengeluaran daerah memiliki hubungan erat dengan pengawasan internal. Pemerintah daerah dengan mekanisme pengawasan yang lemah cenderung mengalami pemborosan anggaran dan inefisiensi operasional.

Penelitian oleh Fitriani dan Khairuddin (2022) juga menekankan bahwa implementasi sistem pelaporan berbasis kinerja berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi anggaran. Sistem ini memungkinkan pemantauan belanja publik secara real-time dan berbasis output, bukan hanya input.

Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

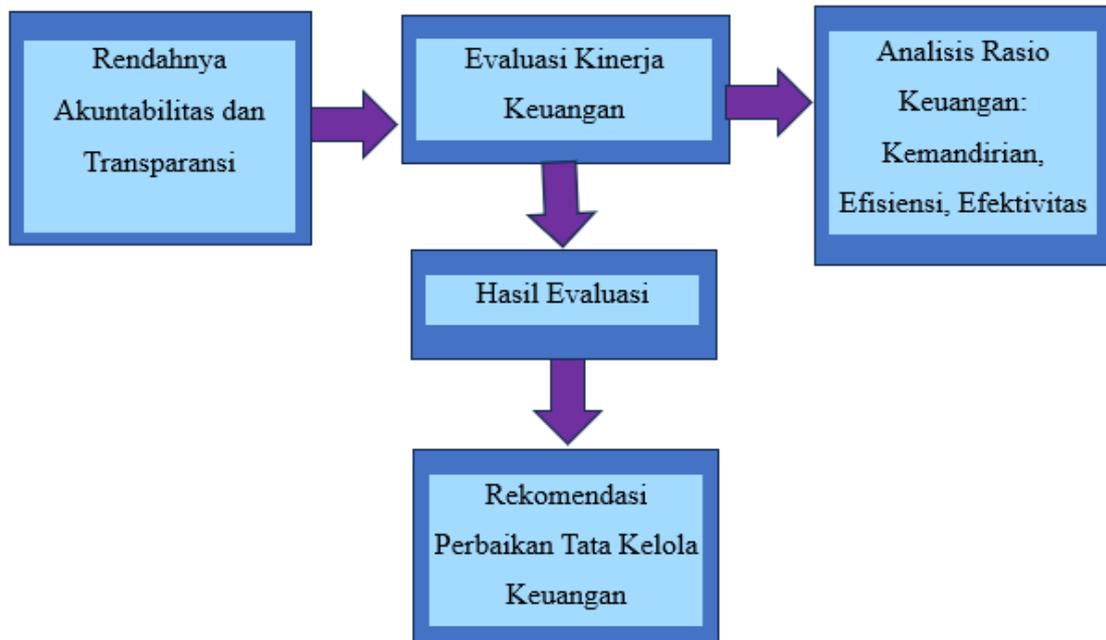
Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kinerja keuangan daerah, masih terdapat *research gap* terkait evaluasi kinerja keuangan di unit-unit administratif legislatif seperti Sekretariat DPRD. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada dinas teknis atau unit eksekutif (BPKAD, Dinas Pendapatan, dsb.), sehingga belum banyak studi yang menelaah secara mendalam bagaimana lembaga pendukung legislatif mengelola anggarannya, terutama dalam konteks efisiensi dan efektivitas APBD.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam sebagian besar penelitian masih dominan kuantitatif, sementara penelitian ini menggabungkan analisis rasio keuangan dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam, sehingga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur terkait tata kelola keuangan daerah dengan fokus pada satuan kerja Sekretariat DPRD, serta memberikan insight baru tentang tantangan fiskal dan kelembagaan di daerah terpencil seperti Kabupaten Paniai.

Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1 berikut merupakan alur pikir yang penulis tuangkan untuk menggambarkan permasalahan dan penyelesaian terhadap hasil penelitian ini.



Gambar 1. Alur pikir penelitian
(Sumber: Penulis, 2025)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Paniai, yang tercermin dari berbagai temuan pemeriksaan, perbedaan data realisasi anggaran, hingga kasus penyalahgunaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan Tata Kelola Keuangan khususnya di sekretariat DPRD kabupaten Paniai.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi aktual kinerja keuangan APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai. Studi kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara kontekstual bagaimana kebijakan anggaran diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana aktor-aktor kelembagaan memahami proses dan hasil pengelolaan anggaran tersebut (Moleong, 2017; Creswell & Poth, 2018). Desain ini juga sesuai untuk mengungkap aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, seperti persepsi, pengalaman, dan strategi manajerial dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik daerah tertinggal dengan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, yakni pada bulan Juli 2025, bertepatan dengan siklus akhir tahun anggaran dan evaluasi kinerja tahunan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan komprehensif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur dan pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam sesuai fokus penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Lima orang informan utama yang diwawancarai terdiri dari: (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator kebijakan anggaran daerah, (2) Sekretaris DPRD sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan anggaran, (3) Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, (4) Kepala Bagian Keuangan, serta (5) Auditor Inspektorat Kabupaten Paniai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi dari sudut pandang informan terkait proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD. Observasi dilakukan terhadap aktivitas administrasi dan penggunaan anggaran di lingkungan kerja Sekretariat DPRD. Sementara itu, dokumentasi meliputi pengumpulan laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dokumen rencana kerja (Renja), dan hasil audit dari Inspektorat dan BPK. Teknik triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas temuan (Creswell & Poth, 2018).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga tahapan: (1) reduksi data, yaitu proses memilah data penting dari hasil wawancara dan dokumen; (2) penyajian data, berupa narasi deskriptif dan tabel yang memudahkan pemahaman pola hubungan antar temuan; dan (3) penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis secara mendalam dan kontekstual. Selama proses analisis, dilakukan verifikasi berulang dan validasi silang antar data untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian.

Metode ini dipandang sesuai untuk mengevaluasi kinerja keuangan dalam kerangka akuntabilitas publik dan efektivitas kelembagaan di sektor pemerintahan lokal, sebagaimana dianjurkan oleh Yin (2018) dalam penelitian studi kasus institusi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan lima orang informan utama yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka dalam pengelolaan keuangan APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai. Karakteristik responden dirangkum dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Terkait (Tahun)
1	Suleman Boma	Plt. Sekretaris Daerah	S2 Manajemen	>15 tahun
2	Martinus Nio	Auditor Ahli Madya, Inspektorat	S1 Teknik Industri	>10 tahun
3	Alfred Yogi	Sekretaris DPRD	S1 Ilmu Sosial	>10 tahun
4	Yuliana R. Batan	Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD	S1 Administrasi Publik	>8 tahun

No	Nama Informan	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Pengalaman Terkait (Tahun)
5	Ludia Kalaba	Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat DPRD	S2 Manajemen Keuangan	>12 tahun

Sumber: Hasil Wawancara (2025)

Berdasarkan Tabel 2, kelima informan memiliki posisi strategis dalam lingkup pengelolaan keuangan dan administratif di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai. Seluruhnya memiliki pengalaman kerja lebih dari delapan tahun, menunjukkan kredibilitas dan kedalaman wawasan yang mumpuni untuk menggambarkan kondisi nyata kinerja keuangan daerah. Latar belakang pendidikan dan jabatan mereka juga memberikan pandangan yang holistik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran.

Rasio Kemandirian Keuangan Sekretariat DPRD

Rasio kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap dana pusat. Hasil wawancara secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai masih sangat rendah. Hampir seluruh dana operasional bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Kemandirian keuangan di sini masih jauh dari ideal. Hampir semua pembiayaan masih kita topang dari pusat. PAD yang masuk ke sekretariat sangat kecil porsinya.”
(Informan 1 – Suleman Boma, Plt. Sekda)

Temuan ini mengonfirmasi bahwa rasio kemandirian keuangan belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Ini memperkuat studi Siregar dan Prabowo (2020) bahwa ketergantungan terhadap dana pusat masih menjadi masalah klasik di daerah-daerah tertinggal.

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Sekretariat DPRD

Efektivitas diukur dari sejauh mana target anggaran – khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) – dapat direalisasikan. Informan menyebutkan bahwa meskipun sebagian besar kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana, banyak hambatan teknis seperti keterlambatan pencairan dana dan perubahan kebijakan yang memengaruhi realisasi anggaran.

“Secara umum kegiatan bisa kita laksanakan. Tapi memang ada banyak kendala teknis, misalnya refocusing anggaran atau proses pengadaan yang lambat.”
(Informan 3 – Alfred Yogi, Sekretaris DPRD)

Rasio efektivitas PAD dalam tiga tahun terakhir fluktuatif, bahkan menurun pada 2023. Hal ini sejalan dengan temuan Ardiansyah (2021) yang mencatat bahwa efektivitas PAD rendah sering kali berkaitan dengan lemahnya sistem data wajib pajak dan pengawasan pendapatan.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran dinilai efisien bila dapat meminimalkan biaya untuk output yang sama atau lebih tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa efisiensi

mulai menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran rutin, tetapi masih terdapat **indikasi pemborosan**, terutama pada pos belanja operasional dan perjalanan dinas.

"Kami sudah mulai evaluasi efisiensi. Tapi masih ada anggaran rutin yang belum optimal penggunaannya, seperti belanja ATK atau perjalanan dinas." (Informan 4 - Yuliana R. Batan, Kabag Umum)

Hal ini memperkuat penelitian Wahyudi dan Prasetyo (2019) bahwa efisiensi anggaran di daerah sangat dipengaruhi oleh pengawasan internal yang lemah dan budaya kerja yang belum berbasis kinerja.

Implikasi Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pengawasan

Semua informan menyatakan bahwa hasil evaluasi APBD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Namun, implementasi dari rekomendasi audit belum berjalan optimal. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya koordinasi antara Sekretariat DPRD dengan lembaga pengawas, serta tidak adanya sistem evaluasi berbasis digital yang dapat menindaklanjuti temuan secara sistematis.

"Evaluasi itu penting, tapi masih ada rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti. Koordinasi antarunit kadang terhambat juga." (Informan 5 - Ludia Kalaba, Kabag Keuangan)

Pengawasan berkala oleh Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BPKAD) berperan penting, tetapi membutuhkan penguatan agar dapat berjalan lebih responsif dan berbasis risiko. Temuan ini sejalan dengan Fitriani dan Khairuddin (2022) yang menyatakan bahwa pelaporan berbasis kinerja dan pengawasan digital terbukti meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Relevansi Temuan terhadap Rumusan Masalah

Hasil-hasil penelitian ini secara langsung menjawab tiga rumusan masalah utama yang telah ditetapkan sebelumnya:

1. **Bagaimana rasio kemandirian keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai?**
→ Terjawab melalui data dan wawancara bahwa kemandirian fiskal masih rendah.
2. **Bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD?**
→ Terjawab dengan temuan bahwa efektivitas relatif baik tetapi masih terkendala teknis, sementara efisiensi belum optimal.
3. **Bagaimana implikasi hasil evaluasi terhadap perencanaan dan pengawasan anggaran?**
→ Evaluasi dilakukan secara rutin, tetapi implementasi hasil evaluasi masih lemah dan perlu penguatan sistem pengawasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai dengan fokus pada tiga indikator utama, yaitu rasio kemandirian fiskal, efektivitas realisasi anggaran, dan efisiensi penggunaan dana publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah, ditandai dengan dominasi dana

transfer pusat sebagai sumber utama pembiayaan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah belum memadai untuk membiayai aktivitas kelembagaan secara mandiri.

Dari sisi efektivitas, kegiatan kelembagaan DPRD pada umumnya telah berjalan sesuai target perencanaan. Namun, realisasi pendapatan dan pengeluaran masih dihadapkan pada hambatan administratif dan dinamika kebijakan anggaran yang menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi. Efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan belanja operasional dan pemanfaatan sumber daya yang belum optimal.

Evaluasi kinerja keuangan yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya dijadikan dasar pengambilan keputusan perencanaan anggaran berikutnya. Meskipun terdapat mekanisme evaluasi internal maupun eksternal, rekomendasi hasil evaluasi sering kali tidak diimplementasikan secara sistematis. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan pelaporan berbasis kinerja yang dapat mempercepat tindak lanjut evaluasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur tentang evaluasi kinerja keuangan daerah, khususnya pada satuan kerja pendukung legislatif seperti Sekretariat DPRD, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian keuangan publik. Temuan ini juga menguatkan pendekatan rasio keuangan sebagai alat ukur yang efektif dalam menilai tata kelola keuangan berbasis akuntabilitas publik. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pimpinan Sekretariat DPRD sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan efisiensi anggaran, penguatan otonomi fiskal, serta pengembangan sistem evaluasi yang lebih responsif dan berbasis data.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup fokus dan jumlah informan yang terbatas hanya pada satu unit kelembagaan, sehingga generalisasi hasil penelitian ke satuan kerja atau daerah lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak menyertakan pengukuran kuantitatif terhadap rasio keuangan berdasarkan data numerik yang lebih luas.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif lintas daerah atau lintas unit kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang kinerja keuangan APBD. Penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) antara kuantitatif dan kualitatif juga direkomendasikan untuk memperkuat validitas temuan serta memberikan hasil yang lebih kaya dan aplikatif bagi pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, H. (2021). *Analisis kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten X menggunakan pendekatan rasio keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Daerah, 14(1), 75–90.
- Bastian, I. (2021). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Fitriani, R., & Khairuddin, M. (2022). Pengaruh sistem pelaporan kinerja terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 102-114.
- Harun, A. (2020). *Manajemen keuangan daerah* (Ed. Baru). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halik, M. Y., Halik, J. B., Sumanti, D. A. F., & Mangampa, S. N. M. (2024). Auditor's Individual Morality In Moderating The Love Of Money And Machiavellian Characteristics Of Accounting Fraud Tendencies. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2889-2903. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i11.p11>
- Ivani, K. A., Lambe, K. H. P., & Irdawati, I. (2024). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BEI. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 6(2), 125-132. <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/235>
- Lambe, K., Patiung, N., & Latiep, I. F. (2025). THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN STRENGTHENING THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 7(1), 60-71. <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/286/168>
- Lestari, D. (2019). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 11(2), 45-59.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1-6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Prasetyo, N., Pasae, Y., & Lambe, K. H. P. (2025). Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Memediasi Pengaruh Penatausahaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 108-119. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/884/738>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Boston: Pearson Education.
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86-92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141-155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Siregar, A., & Prabowo, S. (2020). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 15(3), 120-135.
- Suwandi, S. (2019). *Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Wahyudi, B., & Prasetyo, S. (2019). Pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah di era otonomi. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 9(4), 202–218.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.